

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 1997-2016**



**Disusun sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:
EKA SHOPYA PRATIWI
B300142007**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 1997-2016**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

EKA SHOPYA PRATIWI

B300142007

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Surakarta, 24 Maret 2018

Pembimbing Utama



Dr. Daryono Soebagiyo, MEd

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 1997-2016**

OLEH

EKA SHOPYA PRATIWI

B300142007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu 24 Maret 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Daryono Soebagiyo, MEc

(Ketua)



2. Eni Setyowati, SE, MSi

(Sekretaris)



3. Triyono, Drs, MSi

(Anggota)



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsudin, MM.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Maret 2018



EKA SHOPYA PRATIWI

B300142007

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 1997-2016**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, PDRB dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1997-2016. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, PDRB dan pengeluaran pemerintah, sedangkan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) tahun 1997-2016, yang diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan di estimasi dengan program E-Views. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan produk domestik regional bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi daerah dan *Ordinary Least Square* (OLS)

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of local taxes, user charger, product domestic regional bruto (PDRB) and government spending on regional revenues West Nusa Tenggara Barat Province in 1997-2016. The independent variable used in this study is local taxes, user charger, product domestic regional bruto (PDRB) and government expenditures, while the dependent variable is the original income of the region (PAD) obtained from the central statistical body (BPS) and region income (BAPEDA) in 1997-2016, which is processed by using multiple linear regression analysis with the method *Ordinary Least Square* (OLS) and in estimation with the E-Views program. The results of this study indicated local taxes, user charger, and government expenditures have a positive and significant impact on local revenue (PAD). While the gross regional domestic product bruto (PDRB) does not effect or local revenue.

Keyword: original income of the region, local taxes, user charger, oldinari least square (OLS).

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten atau kota yang juga setiap Kabupaten atau Kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah,

sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penatan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut lahirnya otonomi daerah. Pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan kembali mengalami perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Cherrya, 2012).

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mensejahterakan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah.

Menurut Todaro (2003) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks ekonomi.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi ataupun kabupaten / kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerah sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Untuk itu pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar melemahnya subsidi dari pemerintah pusat dan tidak mengganggu perkembangan perekonomian maupun jalannya pemerintah di suatu daerah, dengan kata lain penurunan penerimaan Negara tersebut telah mendorong meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan system desentralisasi pemerintah dan keuangan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 25 Tahun 1999 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber yang dapat digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada era pemerintahan otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian bagi setiap pemerintah daerah, karena dengan memiliki pendapatan asli daerah yang besar di harapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangannya. Sumber pendapatan pelaksanaan pemerintah daerah adalah salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang dirinci dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Telah diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten / Kota seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimana tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah provinsi dan daerah Kabupaten / Kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Seperti halnya pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sector yang terkait dengan retribusi. Pemerintah menyadari bahwa sketor pajak dan retribusi daerah merupakan sector penyumbang terbesar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Robinson Tarigan (2006:63) pajak yang dipungut dari masyarakat terbagi atas pajak yang dipungut pemerintah pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, serta pajak yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data skunder (*Time Series*) Tahunan yaitu variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB. Data *time series* adalah data satu objek yang meliputi beberapa periode waktu (bisa kuartalan, tahunan dan seterusnya) data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistika dan Badan Pendapatan Daerah.

2.2 Alat dan Model Analisis

Untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, PDRB, dan pengeluaran pemerintah digunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) menggunakan model awal yang telah ditetapkan kemudian diuji terhadap kemungkinan terjadinya multikolinieritas. Multikolinieritas terjadi apabila nilai koefisien korelasi diantara variabel bebas tinggi atau lebih besar dari 0,50 (Gujarati, 2003). Penegeluaran suatu varibel dari model disamping mempertimbangkan besarnya koefisien kolerasi, juga mempertimbangkan nilai t hitung yang paling kecil dari variabel berkolerasi (Santoso. 2001:359).

Dengan menggunakan model fungsional maka akan diperoleh fungsi sebagai berikut:

$$PAD = \beta_0 + \beta_1 PD + \beta_2 RD + U_t$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefesien Regresi

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

U_t = Error Term

Selanjutnya diubah dalam bentuk regresi linier berganda dengan model

sebagai berikut:

$$PAD = \beta_0 + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 PDRB + \beta_4 PP + U_t$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefesien Regresi

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PP = Pengeluaran Pemerintah

U_t = Error

Sumber: Model penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Zahari dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorolangan” yang dilakukan pada tahun 2016.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari uji validitas pengaruh dimuka terlihat variabel yang memiliki pengaruh signifikan adalah variabel pajak daerah, retribusi daerah dan pengeluaran pemerintah. Sementara variabel *produk domestik regionalbruto* (PDRB) tidak memiliki pengaruh signifikan.

3.1 Pajak Daerah

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah periode tahun 1997-2016. Secara bersama-sama dengan variabel lainnya pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septian Dwi Kurniawan (2010), Dina Anggraini (2010), Dwi

Setyaningrum (2014) dan M. Zahari (2016) yang menggunakan pendekatan variabel pajak daerah. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa pajak daerah secara parsial mempengaruhi pendapatan asli daerah. Sedangkan secara simultan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya.

Secara teoritis penelitian ini konsisten dengan pendapat Peacock dan Wiesman (dalam Guritno, 2001) yang mengemukakan perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Fenomena lainnya tidak berpengaruhnya pajak terhadap pemerintah karena dominasi keberadaan hasil pajak daerah maka pengeluaran pemerintah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

3.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan retribusi daerah dengan variabel lainnya berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Setyaningrum (2014) dan M.Zahari (2016) yang menggunakan variabel retribusi daerah sebagai variabel independen. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa retribusi daerah secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian apabila retribusi daerah dimaksimalkan maka meningkatkan pendapatan asli daerah. Disisi lain retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh Pemda tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2004 : 121).

3.3 PDRB

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwi Setyaningrum (2014) PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara teoritis hasil penelitian ini konsisten dengan pendapat Sukirno (1982) yang menyatakan tingkat perkembangan PDRB yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Letak relevansi semakin meningkatnya PDRB maka akan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi (bersaing) akan meningkatkan pembangunan ekonomi.

3.4 Pengeluaran Pemerintah

Hasil analisis variabel Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan Pengeluaran Pemerintah dengan variabel lainnya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara teoritis hasil penelitian ini konsisten dengan pendapat (Guritno, 1994) yang menjelaskan pengeluaran pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam arti seluas-luasnya) melaksanakan kegiatan yang konkretnya berupa penggunaan barang-barang dan jasa atau sumber-sumber daya ekonomi dan dinyatakan dalam penggunaan uang. Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) tentang pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Hasil pengujian untuk uji multikolinieritas bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah atau bebas masalah multikolinieritas sedangkan variabel Pajak Daerah, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah atau terdapat masalah multikolinieritas. Untuk heteroskedastisitas tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas dalam model. Dalam uji autokorelasi juga tidak ditemukan masalah autokorelasi. Pada uji normalitas data berdistribusi normal.
- 2) Uji kebaikan model, pada uji F menunjukkan model yang digunakan eksis, sehingga dengan demikian Pajak daerah, Retribusi Daerah, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 3) Dari hasil uji validitas pengaruh (Uji t), diketahui bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 4) Uji kebaikan model, pada R^2 (Koefisien Determinasi Majemuk) menunjukkan variasi peningkatan PAD tahun 1997-2016 dapat dijelaskan oleh variasi variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah dalam model statistik.

4.2 Saran

Dengan melihat hasil yang diperoleh maka ditemukan beberapa saran yang mungkin akan berguna, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada diarah yang positif. Artinya, kedua variabel tersebut sangat berpengaruh dalam peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, pemerintah harus benar-benar menekankan kebijakan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah agar lebih maksimal lagi.
- 2) Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan, terutama, yang berkaitan dengan pembangunan daerah harus bersifat produktif sehingga Pendapatan Asli Daerah akan terus meningkat.
- 3) Untuk warga masyarakat umum diharapkan bisa menjadi warga Negara yang baik dengan cara membayar pajak tepat waktu dan membayar retribusi sesuai dengan tarif yang berlaku atau yang telah ditentukan oleh PERDA.
- 4) Memberikan berbagai kemudahan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga akan memberikan dampak positif bagi pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.
- 5) Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat memasukkan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dengan begitu Pemerintah Daerah akan dapat mengetahui faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Arifal, Muhammad dan Abral Edi . 2013 . *Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol . 14 No. 1 : 2015

Anonim, Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Anonim, Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Pendapatan Asli Daerah

A. Eahoro , Jhon dan Jayola Olabisi . 2012 . *Tax Administration and Revenue Generation of Lagos States Government Nigeria* . Research Journal of Finance and Accounting Vol . 3 No. 5 : 2012

Abd. H. Rachim , A.F . 2015 . *Analyzing Local Revenue in Local Otonomy Implementation Towards Self-Reliance of Samarinda Municipality* . International Journal of Bussines Management and economics Research Vol . 6 No. 6 : 2015

Arsyad, Lincoln . 2010 . *“Ekonomi Pembangunan”*. Edisi Kelima, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta

Badan Pusat Statistika *“NTB Dalam Angka”* Nusa Tenggara Barat

Badan Pendapatan Daerah *“NTB Dalam Angka”* Nusa Tenggara Barat

Beta , **Asteria** . 2015 . *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah* . Jurnal Riset Manajemen Vol . 2 No . 1 Januari 2015

Cherrya , **wenny**, **Dhia**. 2012 . *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kota* . Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol . 2 No. 1 September 2012

Deniss , **Afubero**h dan **Okoye Emmanuel** . 2014 . *The Impact of Taxation*

on Revenue Generation in Nigeria : A Study of Federal Capital Territory and Selected States . International Journal of Public Administration and Management Research Vol . 2 No. 2 March 2014

Davey, K.J. 1988 . *“Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Penerjemah: Amanullah, dkk . UI-Press, Jakarta.

Fitriani . 2014 . *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bontang* . Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol . 1 No. 2 : 2014

Gujarati, Damodar . 2003 . *Ekonometrik Dasar*, Jakarta, Erlangga

Husain, Walidun . 2013 . *The Influence of Local Taxes and Levies Towards Expenditure Allocation in Kota Gorontalo Indonesia* . Journal Economics and Business Faculty of State University of Gorontalo Vol .15 No. 2 May 2013

J. F. Adebisi dan D.O. Gbegi . 2013 . *Effect Of Tax Avoidance and tax Evasion on Personal Income Tax Administration In Nigeria* . American Journal of Humanities and Social Sciences Vol . 1 No. 3: 2013

J.O, Suberu and Ajala O.A and Akande M.O and Olure-Bank Adeyinka . 2015 . *Diversification of the Nigerian Economy Towards a Sustainable Growth and Economics Development* . International journal of Economic, Finance and Management Sciences Vol. 3 No. 2 March 2015

Kurniawan, Septian Dwi . 2010 *“ Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo”* . Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

M. Mosal , Mourin . 2013 . *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan penerapan Akutansi di Kota*

Manado . Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol . 1 No. 4 : 2013

Md. Arta , Anggar , Krisna, Kusuma dan Ni Gst Putu KusumaWirawati .
2013 . *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD* . Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol . 5 No . 3 : 2013

M. ojong , Kornelius , Anthony , Ogar dan Felix AripkoOka . 2016 . *The Impact of Tax Revenue on Economic Growth : Evidance From Nigeria* . Journal of Economic and Finance (IOSR-JEF) Vol . 7 Issue 1 Ver. 1 January 2016

Mangkoesebroto, Guritno . 1995 . *“Ekonomi Publik”* Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta

Musgrave, Richard A, and Peggy B.Musgrave, 1993 . *“Keuangan Negara-Dalam Teori dan Praktek*, “Edisi Kelima, Alih Bahasa: Alfons Sirait, dkk. Erlangga, Jakarta

N. Ofoegbu , Grace dan O. Okwu , David dan OliverO . 2016 . *Empirical Analysis of Effect of Tax Revenue On Economic Development Of Nigeria* . *International Journal Of Asian Social Science* Vol . 6 No. 10 : 2016

O. T , Ebringa . 2012 . *Analysis of Tax Formation and Impact on Economic Growth in Nigeria* . *International Journal of Accounting and Financial Reporting* Vol . 2 No. 2 : 2012

Pasolo, Faharudiin . 2015 . *The Tedency of Revenue and Levis Contributions to The PAD Jayapura Before and After The Law No* . *Journal and Social Development Sciences* Vol . 6 No. December 2015

Utomo, Yuni Prihadi . 2014 . “*Buku Praktek Komputer Statistik 2 Eviews*”. Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Pembangunan Universitas Muhamadiyah Surakarta

Zahari, M. MS . 2016 . *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)* . Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Vol . 7 No. 2 November 2016